

**PENGELOLAAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN  
PADA *SULTAN GROND* DI DESA SRIGADING  
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



**O l e h :**

**M. ANSORI ARIF**  
**NIM. 06152247**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRACT

Coastal area of Java south represent impecunious pertained area, limited farmland make farmer change over land;ground of marjinal, in this case side of keraton give domination to society to exploit *Sultan Grond*. With existence of program of Reforma agraria in Indonesia that is asset of reform and of acces reform of so called Land Reform Plus, only limited to reinforcement of land right, however required ready access to capital, and Market , technology, building capacity, institute, facilities and basic facilities in order to supporting management of more optimal land;ground asset, utilize to improve the quality of life and prosperity of farmer. Intention of this research is to know systems management of usage of farmland *Sultan Grond* in countryside of Srigading as well as form access expected by farmer.

Research method which is used in this research descriptive method with approach qualitative. needed data cover primary data and data of sekunder. its Technique data collecting through interview with countryside government officer , 30 people farmer of sandy land;ground and document study. While technique analyse its data by using is technics data analysis qualitative.

Result of from this research, management of usage of farm land *Sultan Grond* can be managed better. Processing of land;ground apply technology of Ameliorasi that is mixing cage manure and clay. Sprinkler systems use well of renteng. Systems plant to apply To join with others red pepper shallot gist;sari. Wide land;ground 1000 m<sup>2</sup> yielding shallot  $\pm$  1500 Kg (the rains),  $\pm$  2200 Kg (dry season), red pepper  $\pm$  3200 Kg (not influence season) to once land;ground season. To access which expected by farmer can be concluded for example: (1) Accessing farmer capital wish to get capital of co-operation with amount of responden 18 people (60%).(2) Accessing to market ; farmer expect sale of result harvest to wholesaler, reason of determined price them have according to, result of direct crop in taking by vehicle of wholesaler, and money sale of direct crop result in accepting by farmer with amount of responden 15 people (50%), (3) Accessing to farmer technology expect the availibility of a bit of blood with amount of responden 9 people ( 30%).(4) Accessing to make-up of knowledge (building capacity) of counselling with amount of responden 13 people (43,33%) (5) Accessing institute ; farmer remain to expect farmer group with amount of responden 14 people (46,67%), (6) Accessing facilities and basic facilities ; farmer expect repository warehouse result of crop with amount of responden 12 people (40%).

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
INTISARI .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB.I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	11
A. Telaah Pustaka .....	11
1. Pengelolaan Tanah .....	11
2. Tanah Pertanian .....	12
3. Langkah-langkah Strategis yang mendesak pembangunan pertanian .....	14

4. Maksud dan Tujuan Reforma Agraria .....	20
5. Prinsip dasar dalam Pembaruan Agraria .....	22
6. <i>Sultan Grond</i> .....	30
B. Landasan Teori .....	33
C. Definisi Konseptual .....	36
BAB. III METODE PENELITIAN .....	38
A. Jenis Metode Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Jenis dan Sumber Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data .....	44
BAB. IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul .....	46
B. Gambaran Keadaan <i>Sultan Grond</i> .....	47
C. Gambaran Umum Kecamatan Sanden .....	49
D. Gambaran Umum Desa Srigading .....	50
BAB. V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Pengelolaan Penggunaan Tanah Pertanian pada <i>Sultan     Grond</i> di Desa Srigading .....	58
B. Akses yang diharapkan oleh petani dalam Peningkatan Produksi Pertanian .....	65
C. Rekomendasi Akses yang diharapkan Petani .....	79

BAB. VI PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah adalah modal dasar yang sangat menentukan pada kemajuan sektor pertanian dan merupakan titik sentral usaha-usaha pembangunan, karena itu Pemerintah memberikan perhatian utama pada pembangunan sektor ini. Pembangunan pertanian sebagaimana telah dimaklumi bersama adalah merupakan bagian terpenting dari pembangunan ekonomi nasional. Pelaksananya yang dilakukan bertahap akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sektor pertanian berkembang ke arah yang semakin baik yang berarti makin pentingnya posisi sumber daya alam sebagian besar terdapat di pedesaan berupa tanah untuk pertanian, sumber air, hutan, dan tenaga kerja.

Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, terutama di pedesaan pada sektor pertanian, belum adilnya tatanan kehidupan bersama, serta makin meningkatnya sengketa dan konflik pertanahan tidak terlepas dari ketimpangan struktur penguasaan tanah. Makin meningkatnya jumlah petani gurem di Indonesia bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya bercorak agraris.

Produksi pangan dalam negeri menjadi unsur utama dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan. Upaya kearah itu menjadi strategis di masa mendatang. Dalam konteks pertanian upaya peningkatan produksi tersebut dapat ditempuh melalui dua hal, yaitu: jaminan ketersediaan tanah pertanian (*land availability*) dan peningkatan akses masyarakat petani terhadap tanah pertanian (*land accessibility*).

Ketersediaan akses terhadap tanah hingga saat ini masih merupakan isu penting di Indonesia, yang dicirikan dengan terjadinya ketimpangan dalam alokasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah antar sektor khususnya antara sektor pertanian dan nonpertanian, Saat ini Indonesia masih merupakan salah satu Negara yang harus mengimpor produk-produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Selain itu, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi petani, maka penyusutan tanah tersebut dapat berdampak kepada terjadinya pengangguran secara masal tenaga kerja pertanian Iwan Isa (2006:82 dalam [http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/Pros\\_Iwan\\_06.pdf](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/Pros_Iwan_06.pdf))

Sejak digulirkannya wacana reforma agraria yang semakin intensif akhir-akhir ini, terlebih setelah adanya pidato politik Presiden RI tanggal 31 Januari 2007, telah memberikan sebuah harapan bagi masyarakat petani di Indonesia untuk bangkit dari kemiskinan. Harapan tersebut tentu tidaklah terlalu berlebihan, mengingat tujuan mulia dari

reforma agraria ini hanya dikhususkan bagi masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi. (<http://www.presidensby.info>, 31 Januari 2007).

Untuk mendukung dalam pengelolaan tanah pertanian untuk peningkatan produksi diperlukannya akses-akses, dalam halnya ini pelaksanaan reforma agraria, untuk mencapai Misi BPN tahun 2007-2009 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah menjalankan Program Agraria Nasional (Reforma Agraria), program-programnya adalah : (1) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah kearah yang lebih adil (2) mengurangi kemiskinan (3) menciptakan lapangan pekerjaan (4) memperbaiki akses rakyat pada sumber-sumber ekonomi terutama tanah (5) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan (6) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup (7) meningkatkan ketahanan pangan rakyat dan Indonesia dan ketahanan energi nasional.

Winoto (2007) reforma agraria di Indonesia adalah *aset reform* dan *aces reform* yang disebut juga Land Reform Plus, tidak hanya sebatas pada penguatan hak atas tanah, akan tetapi dibutuhkan penyediaan akses dalam rangka mendukung pengelolaan *aset* tanah (dalam hal penelitian ini pengelolaan tanah pertanian) yang lebih optimal guna meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan, pengelolaan *aces reform* antara lain meliputi: (a) penyediaan

infrastruktur dan sarana produksi, (b) pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima manfaat (c) dukungan permodalan (d) dukungan distribusi dan pemasaran serta dukungan lainnya. Beberapa penelitian terkait dengan Reforma Agraria yang telah dilakukan dikemukakan dalam Tabel 1 :

Tabel 1 Penelitian Tentang Reforma Agraria yang pernah dilakukan

No	Peneliti/tahun	Judul	Hasil
1.	Muhamad Rahman	Implementasi Reforma Agraria : Studi di kecamatan Latoma Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara	Aset reform adalah proses sertifikasi, access reform belum dilaksanakan
2.	Harry Afrian (2008)	Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan	Aset reform adalah dengan redistribusi, Access reform tidak seluruh bisa dilaksanakan
3.	Ahmad Mustajib (2008)	Pelaksanaan Reforma Agraria Di Provinsi Jawa Tengah	Aset reform adalah distribusi/redistribusi akses reform sebagian terlaksana
4.	Yeti Agus Triyani (2008)	Pelaksanaan Reforma Agraria Di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu	Aset reform adalah Distribusi tanah dengan penataan minimum, Access reform Belum adanya dukungan dari <i>stake holders</i>

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pelaksanaan untuk *access reform* masih belum berjalan dengan maksimal, karena tidak adanya dukungan dari instansi terkait, dan kurangnya koordinasi semua

instansi pelaksana dan *stakeholders*, serta belum diketahui akses yang diharapkan oleh para petani.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Selatan, Pesisir merupakan wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat dan laut. Wilayah ini sangat kaya akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang disebut sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir terdiri dari sumberdaya hayati dan non-hayati, dimana unsur hayati terdiri atas ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan biota laut lain beserta ekosistemnya, sedangkan unsur non-hayati terdiri dari sumberdaya mineral dan abiotik lain di lahan pesisir, permukaan air, di kolom air, dan di dasar laut. Sumberdaya pesisir berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam sambutannya saat meresmikan *Solar Packed Dealer* (SPD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kampung Kilangan, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, sabtu, 13 pebruari 2009 mengatakan, '32 persen lebih penduduk Indonesia yang berada di wilayah pesisir masih tergolong miskin, dan tingkat kemiskinan ini dua kali rata-rata tingkat kemiskinan nasional'.  
(<http://spatzi.wordpress.com/tag>)

Kalau kita lihat di Wilayah Pesisir Jawa, Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten di selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanah pertanian di Kabupaten Bantul seluas 35.333 ha, sedangkan jumlah petani dan buruh tani sebanyak 232.634 orang, berdasarkan kepadatan penduduk agraris ternyata rata-rata kepemilikan tanah petani di Kabupaten Bantul hanya 0.16 ha, luasan seperti ini tidak memungkinkan untuk dapat menghidupi keluarga dengan 2 anak.

Berdasarkan olahan data statistik potensi desa 2006 maka dapat dilihat kepadatan penduduk agraria untuk Kabupaten Bantul adalah 19 keluarga/ha lahan pertanian. Sumber kepadatan penduduk agraria adalah jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya dari pertanian per jumlah tanah yang potensi untuk pertanian dan tanah pertanian yang diolah.

Penduduk miskin dan yang menggantungkan hidupnya bagi pertanian. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan mengetahui jumlah buruh tani (masyarakat yang tidak memiliki lahan/*landlessness*) dan penduduk pra sejahtera dan sejahtera 1. Jika menggunakan data indeks kemiskinan manusia diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) 2004 ranking *Human Poverty Index* (HPI) untuk Kabupaten Bantul adalah urutan 88 ditahun 1999 dan mengalami peningkatan di tahun 2002 menjadi urutan ke 53 se-Indonesia. Jumlah keluarga miskin (keluarga pra sejahtera dan

sejahtera 1) sebanyak 74.579 jiwa, sedangkan penduduk yang bermatapencaharian sebagai buruh tani hanya 7.58 % dari total penduduk dan keluarga pertanian sebanyak 90 %.

Ironinya meskipun kepadatan agraria di wilayah perkotaan lebih tinggi dari pedesaan ternyata proporsi buruh tani lebih tinggi di pedesaan terdapat 44.310 orang yang berprofesi sebagai buruh tani yang ada di Bantul, apakah lahan di pedesaan dimiliki oleh tuan tanah yang berasal dari luar desa? Atau kepemilikan lahan terkonsentrasi pada satu atau beberapa juragan tanah? (Badan Pertanahan Nasional, 2008 : 60)

Gambaran topografi Kabupaten bantul bagian pesisir selatan pulau Jawa dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek. Keunikan di pesisir pantai di yogya adalah tanah *Sultan grond*, tidak hanya di Bantul, tetapi juga di Kulonprogo, Sleman, Gunungkidul dan Kota Yogya, di Bantul antara lain tersebar di Parangtritis Desa Parangtritis, Patehan di desa Gading Sari, Pandansimo di Desa Poncosari, Samas di desa Srigading.

Menurut Fernando Jose Marcus (2009:14) Luas tanah sultan Grond di desa Srigading keseluruhannya 581.55 Ha yang dikuasai dan dipergunakan 291 kepala keluarga di 4 Dusun di Srigading yaitu dusun Ngepet, dusun Tegalorejo, dusun Cetan, dan dusun Sugi Sanden. Tekstur tanah di sepanjang hamparan pantai adalah tandus di

Kecamatan Sanden seluas 119 Ha dan penggunaan tanah yang paling banyak adalah pertanian yaitu 33.33 %.

Berdasarkan Kajian Usahatani Lahan Pantai di Kabupaten Bantul oleh Aris Slamet Widodo Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta lahan pantai memiliki sifat agroklimat yang spesifik yaitu jenis tanah berpasir sehingga memiliki tingkat porositas yang tinggi, kesuburan yang rendah dan ketersediaan air yang kurang. Kondisi yang lain adalah kecepatan angin yang kuat namun kelembaban tinggi sehingga evaporasi dan transpirasi cukup tinggi. Kondisi lahan pantai yang demikian tentunya memerlukan suatu usaha pemanfaatan yang memperhatikan faktor ekologi dalam rangka memaksimalkan hasil dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. ([http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/MP\\_Proc\\_C7\\_2009.pdf](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/MP_Proc_C7_2009.pdf))

Wawancara dengan Kepala Desa Srigading pada waktu survei awal peneliti. Karena keterbatasan tanah di Desa Srigading tanah *Sultan Grond* sebagian digarap oleh masyarakat, bekerjasama dengan instansi pemerintah menjadi penggunaan tanah pertanian bawang merah dan cabe merah. Berbeda dengan daerah pesisir pantai Jawa di tempat lain, seperti di Kabupaten Kulonprogo untuk eksploitasi pasir besi, Kabupaten Pasuruan untuk usaha pertanian baik ikan maupun garam.

Karena keunikan dan karakteristik serta perbedaan pertanian dengan daerah lain maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “**Pengelolaan Penggunaan Tanah Pertanian Pada *Sultan Grond* Di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan dengan 2 (dua) pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana pengelolaan penggunaan tanah pertanian Pada *Sultan Grond* di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana bentuk akses yang diharapkan oleh petani dalam peningkatan produksi pertanian ?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya pada pengelolaan penggunaan tanah pertanian yang berstatus *sultan grond* tidak termasuk Hak Milik dan Tanah Kas Desa.

## D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui sistem pengelolaan penggunaan tanah pertanian pada *Sultan Grond* di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
- b. Mengetahui akses yang diharapkan oleh petani untuk meningkatkan produksi pertanian.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan

- c. Pengetahuan mengenai pengelolaan penggunaan tanah pertanian pada *Sultan Grond* di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
- d. Masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan instansi terkait mengenai akses yang diharapkan oleh petani dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem pengelolaan penggunaan tanah pertanian pada *Sultan Grond* di desa Srigading dengan cara mengolah tanah berpasir menerapkan teknologi *Ameliorasi* yaitu mencampurkan tanah liat dan pupuk kandang, sistem penyiraman dengan Sumur renteng, dengan sistem tanam Tumpang sari bawang merah cabe merah,
2. Akses yang diharapkan oleh petani dalam peningkatan produksi pertanian (1) Akses modal : Pinjaman dari Koperasi (2) Akses terhadap pasar : Menjual pada tengkulak (3) Akses terhadap teknologi : ketersediaan bibit unggul (4) Akses terhadap peningkatan pengetahuan (capacity building) : Adanya Penyuluhan (5) Akses kelembagaan : Kelompok Tani (6) Akses sarana dan prasarana: adanya gudang penyimpanan hasil panen.

## B. Saran

1. Pemerintah seyogyanya memberikan perhatian khusus terkait pengelolaan penggunaan tanah pertanian di daerah penelitian, terutama penyaluran hasil pertanian dengan membangun pabrik pengolahan hasil pertanian bawang merah dan cabe merah yang bertempat di ibukota kabupaten Bantul.
2. Akses yang di harapkan petani di daerah penelitian, dapat terwujud bila adanya koordinasi antar instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1995), Manajemen Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta.
- Afrian, Harry. (2008). Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi, Diploma IV STPN (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Anggota IKAPI. (1983). Dasar-dasar Bercocok Tanam. Kanisius, Yogyakarta.  
(<http://books.google.co.id/books?id=te9kIRK5c6wC&pg=PA33&dq=pengertian++TANAH+adalah&cd=1#v=onepage&q=pengertian%20%20TANAH%20adalah&f=true>)
- \_\_\_\_\_. (1993). Jagung. Kanisius, Yogyakarta.  
(<http://books.google.co.id/books?id=eqEkiDWTvXoC&pg=PA68&dq=pengertian+produksi+pertanian&cd=1#v=onepage&q=pengertian%20produksi%20pertanian&f=false>)
- Arminah, Valentina. dkk. (2004). Kajian Pemanfaatan Tanah Pesisir Di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Laporan penelitian STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional.(2008). Fakta dan analisis wilayah pulau jawa bagian selatan Kabupaten Bantul. (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Budi Setyono dan Suradl (2009). Agribisnis Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai melalui Penerapan Teknologi Ameliorasi Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seminar Nasional Peningkatan daya saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani Bogor. 14 oktober 2009, Bogor.

- Fernando, Jose Marcus, (2009). Penguasaan dan Penggunaan tanah-tanah Kesultanan (Sultan Grond) di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanian No.1 Tahun 1. STPN Press, Yogyakarta.
- Hansen, Gary. E. (1981). Agricultural and Rural Development in Indonesia. Westview Press, United States of America.
- Harsono, Boedi. (2003), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya . Djambatan, Jakarta.
- Isa, Iwan. (2006). Kebijakan Dan Permasalahan Penyediaan Tanah Mendukung Ketahanan Pangan, Direktorat Penatagunaan Tanah, BPN RI.  
([http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/Pros\\_Iwan\\_06.pdf](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/Pros_Iwan_06.pdf))
- Moleong, Lexy J. (2007), Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustajib, Ahmad. (2008). Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, Diploma IV STPN (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2007). Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian. (tidak dipublikasikan), Yogyakarta
- Notohadiprawiro, T. (1996) Seminar Sehari Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan tentang Teknologi Lingkungan Menyongsong Era Globalisasi. Yogyakarta, 18 September 1996.  
(<http://www.soil.faperta.ugm.ac.id/tj/1991/1996%20pend.pdf>)

- Rahman, Muhamad. (2009). Implementasi Reforma Agraria Nasional: Studi Di Kecamatan Latoa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Resonansi Reforma Agraria Pada Hari Agraria tahun 2008. (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan. dkk. (2004). Dimensi Pertanahan Pada Kawasan Pesisir Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. Laporan Penelitian STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penelitian Proposal penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional , Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2006, Lokakarya Perumusan Hasil-hasil Simposium Agraria Pembaruan Agraria Untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tidak Dipublikasikan, Yogyakarta.
- Soepriyatno. (2008). Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi. Inside Press, Jakarta
- Sumardjono, Maria. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Kompas, Jakarta.
- Triani, Yeti Agus,. (2008). Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara. Skripsi, Diploma IV STPN (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- Tripurwoko, Taufiq. (2009). Persepsi Masyarakat Terhadap Nilai Sosiohistoris tanah Sultan Grond Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi, Diploma IV STPN (tidak dipublikasikan) Yogyakarta.
- White, Benjamin dan Wiradi Gunawan. (2009). Reforma Agraria Dalam Tinjauan Komparatif. Brighten press, Bogor.

Walinsky, Louis.J. Agrarian Reform As Unfinished Business. Oxford University Press.

Wiradi, Gunawan. (2000). Reforma Agraria Perjalanan Yang Belum Berakhir. Insist Press KPA & Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 tahun 2002 tentang  
Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir  
Selatan